

POLITIK INSTITUSI REZIM INTERNASIONAL (KONSEP DAN PENDEKATAN ANALISIS)

¹Rendi Prayuda, ²Syafri Harto, ³Desri Gunawan

¹Hubungan Internasional, Universitas Islam Riau, Indonesia

²Hubungan Internasional, Universitas Riau, Indonesia

³Hubungan Internasional, Universitas Maritim Raja Ali Haji, Indonesia

Email: rendiprayuda@soc.uir.ac.id, syafriharto@lecturer.unri.ac.id
desrigunawan@umrah.ac.id

ABSTRACT

The concept of international anarchy initially clarifies the absence of actors in international politics of the supernatural organization in the practice of international relations. But the existence of international regime in international politics currently affects the pattern of relations between countries in creating and facilitating the creation and international cooperation. This article analyzes the concepts and approaches of international regime studies by using a qualitative, descriptive approach conducted by a literature study method. The results of this study show that the international regime is the specific actualisation of international organisations formed in a centralistic, independent and rationality. An analysis approach to the international regime is carried out with a rationalist and reflective approach.

Keywords: *politics, institution, international and regime.*

A. Pendahuluan

Dinamika isu dan aktor dalam politik internasional kontemporer hari ini telah menjadikan negara tidak lagi menjadi satu-satunya aktor dalam politik internasional. Terdapat beberapa aktor lainnya yang berpengaruh dalam arena politik internasional, salah satunya adalah organisasi internasional. Menguatnya peran organisasi internasional baik regional ataupun internasional telah menjadikan organisasi internasional yang diisi oleh keanggotaan negara-negara yang bergabung menjadi sebuah rezim dalam politik institusi internasional. Sehingga mengakibatkan semakin bervariasinya isu, aktor dan pola hubungan internasional secara teori dan praktik.

Artikel ini akan mendeskripsikan konsep dan pendekatan dari rezim internasional dalam arena politik internasional. Analisis terhadap rezim internasional dalam kajian ilmu hubungan internasional saat ini mendapatkan perhatian yang cukup besar oleh para penstudi hubungan internasional terutama terkait bagaimana rezim internasional mampu mempengaruhi pola kepentingan dan kebijakan negara sebagai *unitary and rational actor* dan menciptakan pola perdamaian dalam hubungan internasional. Rezim internasional berkembang pesat sejak perang dunia kedua. Sampai saat ini pun rezim sudah meliputi hampir seluruh aspek hubungan internasional yang membutuhkan koordinasi antar *state*, mulai dari isu pertahanan (misalnya pembatasan pengembangan senjata atau

pertahanan kolektif), perdagangan, keuangan dan investasi, informasi dan komunikasi, hak asasi manusia, dan lingkungan.

Hubungan internasional merupakan suatu studi dalam ilmu sosial yang mempelajari mengenai hubungan – hubungan negara, individu atau aktor non negara dengan negara lainnya atau organisasi internasional yang melewati batas – batas teritorial negara. Hubungan internasional bersifat sangat kompleks karena didalamnya terlibat bangsa – bangsa yang masing – masing berdaulat, sehingga memerlukan mekanisme yang lebih rumit dari pada hubungan antar kelompok manusia didalam suatu negara. Hubungan itu secara potensial mengandung tingkat bahaya yang tinggi karena umumnya setiap negara yang terlibat mendasarkan diri pada upaya mengejar kepentingan nasional masing-masing apalagi dengan ditemukannya senjata pemusnah massa.

Asumsi dari studi hubungan internasional adalah bahwa potensi bahaya itu dikurangi dan kemungkinan untuk menciptakan perdamaian bisa ditingkatkan, asalkan umat manusia mau melakukan sesuatu demi tujuan itu. Pengkaji ilmu hubungan internasional sangat merasakan mendesaknya kebutuhan untuk menghindari perang. Pada dasarnya tujuan utama studi hubungan internasional adalah mempelajari perilaku internasional, perilaku para aktor negara maupun non negara di dalam arena transaksi internasional. Perilaku itu bisa berwujud perang, konflik, kerjasama, pembentukan

aliansi, interaksi dalam organisasi internasional dan sebagainya.

Struktur politik merupakan konstruksi atas aktor politik, tingkah laku aktor politik dan aksi serta interaksi mereka didalam masyarakat. Secara struktur politik domestik memiliki struktur politik yang bersifat hirarkis dimana hubungan tatanan politik dan pemerintahan bersifat subordinasi dan pemilihan kepala pemerintahan biasanya didominasi oleh dua partai politik besar. Sedangkan model struktur politik internasional bersifat koordinasi diantara negara-negara dalam dunia internasional. Struktur politik domestik memiliki institusi dan pemerintahan yang berdaulat yang bertugas mengatur dan memelihara stabilitas sistem domesitik, sedangkan politik internasional tidak memiliki lembaga dan pemerintahan internasional yang bertugas menjalankan roda pemerintahan internasional layaknya pemerintahan sebuah negara.

Lingkungan politik internasional yang anarkis memperkenankan setiap negara menjadi final judge (penentu terakhir) atas kepentingannya sendiri, dan harus berusaha dengan kekuatan sendiri mendapatkan semua sarana-prasarana untuk mencapai kepentingan-kepentingannya. Karena ketiadaan otoritas central yang membolehkan perang terjadi, maka pertimbangan keamanan menjadi yang terpenting. Karena efect dari security dilemma, usaha pemerintah untuk melindungi rakyatnya bisa membawa ketegangan dan perang meskipun semua pihak menginginkan perdamaian. Dua negara, atau dua

kelompok negara, mungkin puas dengan status quo dan mencari keamanan, tetapi tidak mendapatkannya. Konflik dan perang dapat terjadi tanpa adanya konflik ekonomi atau ideologi.

Pecahnya perang tidak selalu berarti bahwa ekspansi, atau bahwa manusia pada dasarnya memiliki dorongan untuk mendapatkan kekuasaan. Security dilemma bisa menjelaskan terjadinya sebuah peperangan tetapi tidak bisa menjelaskan semua perang yang pernah terjadi. Perang bisa terjadi ketika tidak seorangpun menginginkannya; perang bisa terjadi karena memang diinginkan. Dalam kondisi anarkis paling benar bukan pertanyaan, "*why does war occur?*" , tetapi "*Why does war not occur more frequently than it does?*". Kalau hubungan internasional adalah dalam state of war, mengapa tidak ada lebih banyak lagi negara yang hancur? Dua jawaban mengantar kita memahami politik internasional: mengapa negara tidak serawan individual - mengapa mereka bisa mengatasi dan tetap survive? Arnolds Wolfers menunjukkan mengapa keamanan, meskipun mahal, bersaing dengan tujuan lain dari suatu negara dan mengapa batas-batas diperlukan terhadap usaha melakukan keamanan. Pengertian anarki merupakan starting point untuk memahami hubungan internasional.

Balance of power merupakan suatu sistem dan cara yang ditempuh dalam pergaulan antar bangsa dimana stabilitas internasional dapat dicapai melalui usaha-usaha negara yang secara sengaja mengejar tujuan stabilitas atau tidak. Seperti halnya teori Adam Smith yang

mengatakan bahwa jika setiap orang memburu kepentingannya sendiri, maka interaksi egoisme masing-masing individu justru akan meningkatkan kesejahteraan nasional. Demikian juga para teoritis Hubungan Internasional mengajukan alasan, jika setiap negara mengejar kekuasaan bahkan dengan kemungkinan merugikan negara lain, maka tidak ada satupun negara yang akan memiliki dominasi. Pada kedua kasus ini kepentingan bersama malahan akan terpelihara, sebagai hasil dari berbagai interaksi individual yang selfish. Kendati demikian perlu dicatat bahwa sistem *balance of power* kadang-kadang gagal dalam mencegah perang, kalau terjadi suatu "shift" atau perubahan cepat dari keseimbangan itu. Balance of power dapat mencegah kemungkinan suatu negara atau kelompok negara merebut hegemoni dan dapat menjamin adanya ekuilibrium, tetapi belum dapat menjamin tercapainya perdamaian.

Stephen Haggard dan Beth A. Simmons (1987) mengatakan bahwa rezim internasional muncul sebagai fokus penting dari riset empiris dan debat teoritis di dalam hubungan internasional. Perbedaan signifikan antara model kompetitif, *zero-sum-game* dari hubungan antarnegara dan "kewenangan" dari politik domestik terlihat terlalu banyak mengambil penjelasan dari perilaku diantara negara maju. Padahal dilemma kebijakan diciptakan dari tumbuhnya rasa saling ketergantungan sejak perang dunia yang menghasilkan sebuah bentuk koordinasi dan organisasi baru yang sama sekali tidak sesuai dengan kerangka

berpikir realis yang menganggap kerjasama antar negara tidak mungkin akan terjadi. Kehadiran rezim internasional ini timbul karena adanya ketidakpuasan dengan konsep dominan dari tata aturan internasional, kewenangan, dan organisasi.

Definisi rezim dapat pula dikutip dari Donald Puchala dan Raymond Hopkins yang berargumen bahwa sebuah rezim ada di dalam setiap *issue area* hubungan internasional dimana terdapat keteraturan perilaku, seperti prinsip-prinsip, norma-norma atau aturan-aturan harus ada untuk dipertanggungjawabkan. Seperti yang dikutip di bawah ini: *a regime exists in every substantive issue-area in international relations... Wherever there is regularity in behavior, some kinds of principles, norms or rules must exist to account for it.* (Puchala, 1982: 356). Definisi luas akan beresiko mencampuradukan pola perilaku teratur dengan aturan, dan hampir pasti terlalu jauh memprediksikan level kesepakatan *normative* dalam politik internasional. Mengurangi rezim dari pola perilaku akan membuatnya sulit untuk memutuskan bagaimana mereka bermediasik, berlawanan, atau mempengaruhi perilaku. Kata "rezim" seringkali digunakan sebagai cara paling murni menggambarkan kelompok dari rangkaian perilaku-perilaku negara di dalam isu-isu tertentu, tetapi pendekatan ini sudah banyak ditinggalkan.

Sementara itu Strange (1982) membantah, ia menekankan bahwa rezim merupakan miskonsepsi di mana sebenarnya tidak ada kepentingan bagi

norma-norma, prinsip, peraturan-peraturan dan *decision-making procedure*. Strange berpendapat rezim masih cenderung bersifat *state-centric*, artinya rezim internasional sesungguhnya tak lebih dari sebuah bentuk multilateralisme antar negara semata. Teori rezim dianggap masih terlalu bernuansa *realist* dan menjadi kurang relevan dalam studi hubungan internasional kontemporer terutama setelah berkembangnya pemikiran-pemikiran yang membahas tentang *power* dan *interdependence*. Kelemahan kedua teori rezim ini berasal dari konsentrasinya pada regulasi-regulasi yang sangat spesifik: rezim internasional tidak selalu berupa konstruksi atau tatanan politik yang bersifat komprehensif. Artinya, teori rezim memang berhasil melepaskan diri dari asumsi anarki dalam hubungan internasional, tetapi hanya dalam kerangka spesifik tersebut.

Selanjutnya adalah Aliran pemikiran liberal yang menyatakan bahwa rezim mutlak diperlukan demi menjaga kooperasi antar Negara-juga mendapatkan perlawanan berupa kritik yang mengatakan bahwa rezim justru merupakan sumber penambah konflik atau inefisiensi dalam politik dunia. Kritik terhadap rezim mengekspresikan ketidaksepahaman mereka terhadap rezim yang berpengaruh sebagai sumber penambah konflik atau inefisiensi dalam politik dunia. Seperti halnya rezim keamanan yang diorganisasikan oleh *United Nations Security Council* (Dewan Keamanan PBB) seringkali disebutkan sebagai sumber

konflik negara-negara di dunia. Beberapa ahli lain mengatakan bahwa rezim hanya membuat kontrol demokratis lemah. Walaupun demikian rezim sangat berpengaruh terhadap aspek kehidupan penting anggota penyusunnya kendati pada prakteknya mereka tidak mengindahkan prinsip-prinsip demokratis yang diterapkan dalam lingkup domestik anggotanya.

Kritik lain menyatakan bahwa kebanyakan rezim hadir untuk mewakili pandangan teknokratif dari birokrat yang bekerja di rezim internasional tersebut, dengan mengatasnamakan perjanjian internasional, mereka memberikan pengaruh mereka terhadap perumusan perjanjian tersebut di belakang layar secara tertutup. WTO misalnya telah menciptakan situasi "*democratic deficit*" atau defisit demokrasi dengan membangun suatu departemen mengurus masalah kerakyatan (*civilian affairs department*) yang semestinya mereka bertindak sebagai *liaison* dari kehendak orang banyak bukan sebaliknya mencampuri urusan orang. Oleh karena itu menguatnya peran rezim internasional dalam politik internasional semakin memberikan warna baru dalam arena perpolitikan internasional dalam menciptakan perdamaian internasional yang lebih fleksibel.

B. Metode

Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang menganalisis permasalahan penelitian secara empiris. Pendekatan kualitatif ini menggunakan jenis studi kepustakaan yang fokus pada analisis jurnal dan buku

terkait studi kasus terhadap eksistensi rezim internasional dalam arena politik internasional. Selanjutnya analisis data dilakukan secara induktif dengan mengumpulkan terlebih dahulu artikel yang berhubungan dengan permasalahan penelitian dan selanjutnya kesimpulan terhadap hasil temuan penelitian dilakukan pada bagian akhir penelitian.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Struktur politik internasional yang bersifat anarkisme internasional dimana tidak ada lembaga yang mengatur dalam hubungan dan politik internasional mengakibatkan setiap negara dalam dunia internasional harus meningkatkan kekuatan militer dan pertahanannya masing-masing agar menghindari serangan militer dari negara lain. Dengan fokusnya setiap negara untuk mengembangkan kekuatannya maka akan menimbulkan kecurigaan yang berlebihan satu negara dengan yang lainnya. Sehingga dengan adanya dilema keamanan terhadap masing-masing negara akan kekuatan militer masing-masing negara tersebut, mengakibatkan terjadinya keseimbangan kekuatan diantara negara-negara dunia internasional. Politik internasional dengan bersifat anarkisme internasional melahirkan keseimbangan kekuatan diantara masing-masing negara, karena masing-masing negara merasa dilema untuk melakukan penyerangan terhadap negara lain begitu juga sebaliknya.

Berbeda dengan politik domestik, politik internasional berlangsung disuatu

arena yang tidak memiliki lembaga pemerintahan sentral. Tidak ada badan-badan yang berada diatas negara yang memiliki otoritas dan kekuasaan untuk membuat aturan atau menyelesaikan konflik. Negara-negara bebas melakukan komitmen dan perjanjian dengan negara lain, tetapi tidak ada kekuasaan yang bisa menjamin dan mampu mengawasi pelaksanaan kalau terjadi deviasi. Hal ini yang dimaksud dengan *anarchic environment of international politics*-ketiadaan supreme power. Situasi anarchy dikatakan sebagai a "state of war".

Konsep *State of war* tidak berarti bahwa setiap negara secara konstan berada ditepi jurang peperangan atau dalam keadaan berperang dengan negara lain. Banyak negara merasa terancam oleh *some states at some time*; dan setiap negara mengalami masa-masa tidak aman secara intense. Tidak ada dua negara bertetangga yang didalam sejarahnya berdekatan dan bersahabat tanpa diselingi ketegangan bahkan peperangan. Karena negara tidak dapat mengharapka adanya *supreme body* untuk memaksakan aturan, ataupun mengharapka bantuan atau dukungan negara lain, mereka harus mengandalkan pada usaha sendiri, khususnya mempertahankan diri dari serangan.

Untuk memahami struktur politik adalah bahwa sistem internasional terdiri atas *independent political entities*. Entities ini sebagian besar adalah negara, yang memiliki kemampuan untuk menggunakan force terhadap negara lain. Konflik kepentingan diantara mereka menyebabkan penggunaan *force* tidak dapat dihindarkan. Dalam pengertian

formal, struktur politik ini adalah anarki; sistem yang tidak mempunyai political controller untuk mencegah penggunaan force dan untuk memaksakan hukum dan tatanan yang universal. Global anarki berbeda dengan sekelompok individu dimana hubungan diantara mereka *totally* tanpa pemerintahan. Struktur yang anarkis adalah dalam pengertian bahwa *political power* dan *authority* terletak pada bagian-bagian dari sistem – yaitu negara, dan bukan pada keseluruhannya. Hubungan diantara negara ditentukan oleh nilai-nilai dan batasan-batasan power mereka sendiri. Hubungan didalam sistem seperti itu membentuk apa yang disebut *balance of power*. Tatanan didalam *balance of power* tergantung pada tingkat disagreement diantara negara-negara besar, kemauan dari sebagian terbesar negara-negara yang mau menanggung, dan pada kemauan negara-negara lain untuk sepakat mengenai aturan-aturan dan norma-normanya.

Anarki merupakan *self help system* dimana negara bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidupnya sendiri. Hubungan diantara aktor yang independent selalu memiliki kemungkinan konflik mengenai masalah politik, ekonomi dan sosial, dan kadangkala konflik tersebut akan mengakibatkan penggunaan force. Strategi menjadi sesuatu yang tidak bisa dihindari yang menyertai kehidupan politik negara didalam anarki internasional. Struktur anarki terbukti sangat bertahan lama, dan selama struktur tetap seperti itu, strategi akan terus berlangsung dalam hubungan

internasional. Variabel kedua adalah sifat teknologi yang tersedia pada aktor politik. Anarki menciptakan kebutuhan yang menyeluruh bagi strategi, dan meletakkan kondisi yang menentukan tujuan mengapa force digunakan. Teknologi merupakan faktor yang menentukan ruang lingkup opsi militer, ciri ancaman militer, dan konsekwensi kalau menggunakan *force* tersebut. Tekonologi dalam pengertian lain, merupakan variabel utama yang mempengaruhi instrument of force yang tersedia bagi aktor politik. Sifat dari instrumen tersebut meletakkan kondisi dasar dari strategi, dan salah satu sebab mengapa teknologi selalu berubah terus menerus. Oleh karena itu dinamika ini tentu saja tidak lepas dari peran organisasi internasional sebagai salah satu aktor dalam politik internasional.

Organisasi Internasional tidak selalu berhasil berpartisipasi aktif dalam banyak permasalahan di kancah politik internasional. Hal ini terbukti dengan kegagalan sanksi Dewan Keamanan PBB terhadap negara Libya, Laporan inspektorat IAEA dalam perkembangan nuklir Korea Utara, pasukan perdamaian PB di kawasan Timur Tengah dan banyak kasus lainnya yang terjadi dan menggambarkan secara jelas ketidakberhasilan organisasi internasional dalam menyelesaikan konflik antar negara di kancah politik internasional. Kegiatan organisasi internasional dalam menyelesaikan konflik yang terjadi antara negara-negara dalam politik internasional, seperti yang dilakukan oleh PBB adalah sebagai berikut, yaitu: membantu dalam hal

pendanaan, pencegahan konflik, pencegahan konflik untuk tidak meluas dengan cara mediasi, adjudikasi, dan bentuk resolusi konflik lainnya.

Mengapa negara mau menggunakan organisasi internasional sebagai forum kerjasama? Bagaimana bentuk kerjasama internasional antar negara dalam organisasi internasional? Dan untuk menjawab pertanyaan itu maka konsentrasi tulisan ini menyangkut mengenai struktur dan cara operasi organisasi internasional itu sendiri. Berdasarkan penjelasan diatas, maka terdapat dua fungsi karakteristik negara dalam organisasi internasional yaitu sentralisasi dan independen. Berdasarkan karakteristik tersebut, maka bentuk dari hubungan antara negara dalam dunia internasional adalah institusionalisme.

Institusi atau Rezim internasional mulai berkembang semenjak masa Perang Dunia II, dimana pertemuan Bretton – Woods yang digelar pada pertengahan tahun 1944 merupakan cikal bakal terbentuknya institusi atau rezim internasional, khususnya dibidang ekonomi. Sampai saat ini pun rezim sudah meliputi hampir seluruh aspek hubungan internasional yang membutuhkan koordinasi antar *state*, mulai dari isu pertahanan (misalnya pembatasan pengembangan senjata atau pertahanan kolektif), perdagangan, keuangan dan investasi, informasi dan komunikasi, hak asasi manusia, dan lingkungan; merupakan contoh dari sekian banyak urusan dalam sebuah rezim internasional. Menurut Robert O Keohane, institusi internasional merupakan suatu perangkat

peraturan pemerintah yang meliputi jaringan-jaringan peraturan, norma-norma dan cara-cara yang mengatur serta mengawasi dampaknya. “Norma” dalam konteks tersebut adalah nilai-nilai yang didalamnya terkandung fakta tepercaya, penyebab dan *rectitude* (keadilan/kejujuran). Sedangkan yang dimaksud dengan “nilai-nilai” adalah perilaku standar yang terbentuk karena adanya kewajiban dan keharusan (Robert O. Keohane, 1989, Hal. 3-4).

“Peraturan” sendiri mengandung anjuran untuk bertindak secara spesifik yang sifatnya membatasi. Sedangkan “*decision-making procedure*” (prosedur membuat keputusan) merupakan praktek berlaku untuk membuat dan mengimplementasikan pilihan kelompok. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pengertian rezim secara kontekstual merupakan gabungan dari keempat nilai-nilai dasar tersebut di atas yang secara keseluruhan memfasilitasi lahir dan bertahannya sebuah rezim. Institusi internasional sebagaimana penjelasan diatas dapat diartikan sebagai salah satu dari tiga bentuk, yaitu sebagai berikut:

1. Organisasi formal antara pemerintah atau organisasi antar negara non pemerintah. Sebagai sebuah organisasi yang memiliki tujuan khusus, organisasi ini bisa mengawasi aktivitas dan memberikan respon terhadap aktivitas tersebut dan organisasi ini dibentuk oleh negara-negara.
2. Rezim internasional, Rejim adalah insitusi yang memiliki peraturan eksplisit yang disetujui oleh

negara-negara. Peraturan-peraturan tersebut dihubungkan dengan beberapa isu-isu hubungan intrnasional. Sebagai contoh, rejim IMF yang dibentuk di Bretton Woods pada tahun 1944, serta rejim Hukum kelautan yang diprakarsai oleh PBB pada tahun 1970-an.

3. Konvensi, dalam teori sosial dan filosofi, konvensi adalah institusi informal yang memiliki peraturan dan kesepakatan yang implisit yang membentuk harapan dari para aktor-aktor yang terlibat. Konvensi memungkinkan aktor-aktor tersebut untuk memahami aktor yang lain tanpa adanya peraturan yang eksplisit, guna mengkoordinasikan tindakan-tindakan mereka. Sebagai contoh, prinsip kekebalan (*immunity*) diplomasi tradisional merupakan sebuah konvensi sebelum dikodifikasi dalam dua perjanjian internasional pada tahun 1960an (Robert O. Keohane, 1989, Hal. 3-4).

Selain itu, dalam implementasinya maka Robert Keohane juga menyatakan bahwa peran institusi adalah sebagai berikut:

1. Menyediakan aliran informasi dan kesempatan bernegosiasi.
2. Meningkatkan kemampuan pemerintah memonitor kekuatan lain dan mengimplementasikan komitmennya sendiri—oleh karena itu kemampuannya membuat komitmen yang dapat

dipercaya berada di urutan pertama.

3. Memperkuat harapan (level ekspekasi) yang muncul tentang kesolidan dari kesepakatan internasional (Robert O. Keohane, 1989).

Tingkat institusionalisasi sebuah lembaga dapat diukur dengan menggunakan tiga dimensi, sebagai berikut:

- a. Kebersamaan (*commonality*) : derajat dimana harapan-harpan terhadap perilaku dan pemahaman yang tepat mengenai bagaimana menginterpretasikan tindakan dibagi bersama oleh partisipasi dalam sistem tersebut.
- b. Kekhususan (*specificity*): derajat dimana harapan-harapan ini jelas khusus dalam bentuk aturan-aturan
- c. Otonom (*autonomy*): perluasan dimana institusi dapat mengubah aturannya sendiri daripada bergantung pada badan-badan dan agen-agen asing (negara) untuk melakukan hal tersebut.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka terdapat dua fungsi karakteristik istitusi atau rezim internasional yaitu sentralisasi dan independen (Haggard, Stephan and Simmons, B.A, 1987). Berdasarkan karakteristik tersebut, maka bentuk dari hubungan antara negara dalam dunia internasional adalah institusionalisme. Pengertian sentralisasi dalam hubungan antar negara dalam organisasi internasional adalah aktivitas secara kolektif yang nyata dan setara

dalam struktur dan administrasi organisasi internasional. Sedangkan independen berarti kemampuan negara untuk beraksi persetujuan otoritas anggota organisasi lainnya. Dalam hal ini independen organisasi internasional adalah ketidakberpihakannya organisasi internasional dalam menyelesaikan konflik antar negara anggota. Hubungan antar sentralisasi dan independen ini adalah fungsi utama organisasi internasional dalam memfasilitasi perundingan dan implementasi kesepakatan, resolusi konflik dan mengantisipasi terjadinya konfrontasi diantara negara-negara internasional.

Independen organisasi internasional sangat berperan penting dalam eksistensi sebuah organisasi internasional. Independen organisasi internasional memiliki beberapa fungsi yang sangat mendukung kinerja organisasi tersebut, yaitu independen organisasi internasional mendukung hubungan interaksi negara secara langsung. Karena dengan independennya sebuah organisasi internasional membuat negara-negara bersedia untuk diatur dan menjadi anggota dalam organisasi internasional. Selain independen organisasi internasional, sebuah organisasi internasional juga harus mampu untuk menerapkan sikap netralitas dalam menyelesaikan konflik antar negara dalam dunia internasional.

Selain konsep sentralisasi dan independen, maka konsep kerja sama antar negara-negara dalam dunia internasional menurut Robert Keohane juga sangat memegang peranan yang

penting. Dalam dunia internasional yang anarki ini maka setiap negara berdasarkan perspektif neo liberalisme mutlak membutuhkan negara lain untuk mencukupi kebutuhan domestik nasionalnya. Sehingga dengan adanya kepentingan setiap negara tersebut mengakibatkan setiap negara harus melakukan hubungan kerja sama dengan negara lain. Kerja sama yang dilakukan oleh negara-negara dunia internasional sangat dibutuhkan guna terciptanya hubungan yang dinamis dan menghindari terjadinya konflik horizontal antar negara (Krasner, Stephen D. 1982). Dan kerja sama negara tersebut dibingkai dalam sebuah forum organisasi internasional yang saat ini dikenal dengan konsep institusi internasional.

Pendekatan Rasionalitas dan Reflektivitas dalam Institusi Internasional

Beberapa pendekatan dalam kajian institusi internasional adalah pendekatan rasionalitas dan reflektivitas. Pendekatan rasionalitas sebagian besar lebih fokus pada institusi internasional itu sendiri. Pendekatan rasionalitas ini menekankan bagaimana sebuah negara yang memiliki derajat dan kedudukan yang sama dalam hubungan internasional atau sesama negara yang memiliki kedaulatan mau bergabung dan memberikan kedaulatannya kepada sebuah institusi internasional. Pendekatan rasionalitas ini tercermin dengan adanya kesepakatan bersama yang bagi negara-negara internasional kesepakatan tersebut merupakan sebuah kesepakatan yang memberikan keuntungan bersama.

Sehingga secara rasional dengan adanya kepentingan, kebutuhan dan kesepakatan bersama menjadikan negara-negara dalam dunia internasional mau menyepakati dan terikat dalam aturan-aturan institusi internasional. Selain itu pendekatan rasionalitas juga membantu kita untuk melihat kesepakatan yang akan disepakati atau tidak disepakati oleh negara-negara dalam sebuah institusi internasional.

Menurut Robert O Keohane, sebuah institusi atau rezim internasional akan menjadi efektif kinerjanya ketika kedaulatan masing-masing negara di dunia internasional dilihat secara hirarki objektif. Sebagai contoh institusi internasional seperti *General Agreement on Tarrif and Trade* (GATT), *International Monetary Fund* (IMF) dan *United nations* (UE) sampai saat ini belum mampu untuk mengotimalkan kinerjanya sebagai sebuah organisasi internasional yang mampu mengayomi dan menjadi efisien kinerjanya yang dikarenakan masih adanya intervensi dari negara-negara kuat untuk mendapatkan kepentingan dan keuntungan yang lebih besar. Pendekatan selanjutnya adalah pendekatan reflektivitas. Pendekatan ini mendasarkan pada nilai-nilai, norma dan budaya yang dijadikan sebagai efektif atau tidaknya sebuah institusi internasional. Menurut pendekatan ini konsep nilai, norma dan budaya mampu menjadi tingkat efektivitas dari sebuah organisasi atau institusi internasional, karena dengan kesamaan nilai, norma dan budaya mampu menjadi pengikat yang kuat bagi negara-negara di dunia internasional

untuk mau bergabung dan diikat secara kuat oleh kesepakatan bersama dalam institusi internasional.

Dalam perkembangannya secara kontemporer refleksi bentuk institusi internasional tidak hanya tergambar dari institusi ekonomi seperti seperti *General Agreement on Tarrif and Trade* (GATT), *International Monetary Fund* (IMF), tetapi refleksi institusi internasional juga tergambar dari isu-isu lain seperti isu keamanan dan isu lingkungan. Refleksi institusi internasional yang muncul dari isu keamanan salah satunya adalah dalam permasalahan perang nuklir, dimana terbentuknya *International Atomic Energy Agency* (IAEA) dari perjanjian non proliferasi nuklir atau *Non Proliferation Treaty* (NPT). Begitu juga dalam permasalahan lingkungan saat ini yang didominasi oleh permasalahan krisis iklim atau yang dikenal dengan *climate change*, maka juga terdapat refleksi institusi internasional berupa *Protocol Kyoto* yang mengikat negara-negara di dunia internasional yang memiliki kesepakatan bersama untuk tujuan bersama.

Norms, Culture and World Politics: Insight from Sociology's Institutionalism

Kajian sosiologi merupakan salah satu ilmu tertua yang berkembang dalam kajian ilmu sosial dan ilmu politik. Ilmu sosiologi membahas mengenai interaksi manusia dalam kehidupan masyarakat, mengenai bagaimana dan pola hubungan seperti apakah yang digunakan oleh seseorang dalam interaksi sesama manusia di masyarakat. Sedangkan kajian hubungan internasional melihat

keseluruhan interaksi negara dalam dunia internasional baik kerjasama, perundingan atau diplomasi, negosiasi, konflik, perang dan lain sebagainya. Negara merupakan cerminan dari manusia atau pemerintah sehingga dalam arti yang sebenarnya, interaksi negara merupakan interaksi manusia atau pemerintah dengan pemerintah negara lain. Sehingga untuk menganalisa hubungan tersebut ilmu sosiologi juga sangat memberikan kontribusi yang besar bagi perkembangan ilmu hubungan internasional.

Berdasarkan uraian diatas, maka jelaslah bahwa hubungan internasional merupakan kajian ilmu yang bersifat interdisipliner, yaitu pertemuan antara subjek-subjek cabang ilmu sosial dan ilmu politik seperti ilmu sosiologi, antropologi, administrasi dan cabang ilmu sosial lainnya. Sosiologi kelembagaan memiliki kajian yang erat sekali dengan kajian ilmu hubungan internasional. Hubungan ini juga bisa dilihat dengan tantangan paradigma dominan dalam kajian ilmu politik secara langsung. Selain itu yang kedua adalah kelembagaan berpendapat secara langsung bahwa pendekatan teoritis berkembang dalam kajian neo realisme-neo liberalisme di dalam ilmu hubungan internasional.

Ketiga adalah sosiologi kelembagaan kedepannya mengkonstruksikan pendapat bahwa kajian ilmu politik menurutnya menyediakan banyak kerangka pemikiran teoritis yang dapat digunakan untuk mengkaji ilmu hubungan internasional berdasarkan pemikiran sosiologi. Faktor

keempat adalah sosiologi kelembagaan lebih menyentuh kajian dan permasalahan dalam hubungan internasional dibandingkan dengan sebatas abstraksi pemikiran. Dan pada akhirnya pengkaji sosiologi kelembagaan lebih menekankan bahwa budaya global secara langsung saat ini masih menjadi perdebatan, seperti konsep pemikiran Samuel Huntington mengenai benturan peradaban.

Rezim internasional saat ini berkembang dengan pesat dalam kajian hubungan internasional. Peran institusi atau rezim internasional sangat penting dalam politik internasional guna menciptakan kerja sama di antara negara-negara internasional. Menurut Stephen D. Krasner, rezim internasional adalah suatu tatanan yang berisi kumpulan prinsip, norma, aturan, proses pembuatan keputusan baik bersifat eksplisit maupun implisit yang berkaitan dengan ekspektasi atau pengharapan aktor-aktor dan memuat kepentingan aktor itu sendiri dalam hubungan Internasional (Stephen D. Krasner, 1982). Selain itu, Krasner juga menyatakan bahwa rezim tidak hanya mempunyai implikasi terhadap norma-norma yang memfasilitasi terciptanya kerjasama semata, melainkan suatu bentuk kerjasama yang juga lebih dari sekedar kepentingan internal dalam jangka pendek.

Oran R. Young juga berpendapat bahwa rezim internasional adalah seperangkat aturan, prosedur pembuatan keputusan, dan atau program yang membutuhkan praktek sosial, menetapkan peranan bagi partisipan dalam praktek tersebut dan kemudian

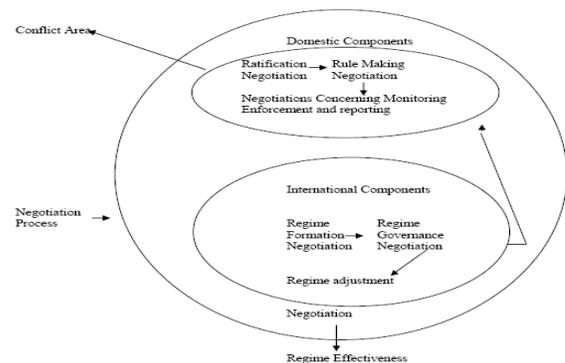
mengelola interaksi-interaksi mereka. Raymond Hopkins dan Donald Puchala juga sependapat dengan Young bahwasanya tidak ada yang dapat membuat sebuah negara dapat bertahan selama waktu tertentu jika tidak didukung oleh keberadaan sebuah rezim. Artinya, rezim secara mutlak diperlukan bagi negara-negara sebagai wadah lalu lintas komunikasi negara-negara dalam menyelesaikan masalahnya bersama seperti rezim internasional yang berfungsi sebagai sarana komunikasi negara-negara anggota dalam menyelesaikan permasalahan yang mengancam anggota rezim.

Kajian mengenai negosiasi yang dilakukan dalam rezim internasional terdiri atas dua tesis besar, yaitu **Pertama**, penyelesaian perselisihan antar negara dengan cara menggunakan negosiasi yang bersifat kondisional. Kajian ini dilakukan oleh William Ury dan Bruce Patton, yang kemudian dikenal sebagai rezim negosiasi *Getting to Yes*. Tesis ini menjelaskan bahwa cara dalam membangun komunikasi, memusatkan perhatian kepada kepentingan dibandingkan posisi, dan mendorong digunakannya kriteria objektif dalam negosiasi (Roger Fisher, William Ury, Bruce Patton. 2005).

Kedua, menyelesaikan perselisihan antar negara dengan menciptakan sebuah rezim internasional dengan cara menciptakan kesepakatan penyelesaian. Kajian ini mendasarkan bahwa indikator ketaatan sebuah negara dalam rezim merupakan hal yang paling penting untuk mempertahankan eksistensi dari sebuah rezim internasional

(Bertram I. Spencer, I William Zartman. 2003). Maka proses menciptakan sebuah rezim dilaksanakan dengan menciptakan jalur komunikasi di tingkat multilateral negara dan komunikasi di tingkat domestik negara. Komunikasi di level multilateral negara dilakukan dengan tujuan berdasarkan kegiatan negara – negara anggota dan komunikasi di level domestik negara lebih merujuk pada aktivitas ratifikasi, pembuatan produk politik dan hukum terkait dengan ratifikasi negosiasi, dan implementasi kesepakatan dalam negosiasi untuk menyelesaikan masalah. Berikut ini merupakan gambar bagan proses kerja rezim internasional baik di tingkat nasional ataupun nasional, yaitu sebagai berikut:

Gambar 1. Dinamika Proses Negosiasi dalam Sebuah Rezim Internasional



Sumber: Spencer, I William Zartman, *Dinamika Proses Negosiasi dalam Sebuah Rezim Internasional*.

Oleh karena itu ketika menganalisa proses dan efektifitas dari sebuah rezim internasional dalam politik internasional maka selain dari perundingan dan negosiasi tingkat internasional oleh

masing-masing perwakilan negara, maka peran dari negosiasi di tingkat nasional setiap negara tentu juga sangat penting hal ini dikarenakan dalam proses ratifikasi peraturan menjadi undang-undang maka setiap unsur elemen baik pemerintah ataupun masyarakat akan menganalisa hal ini dari sisi kepentingan nasional negara tersebut.

D. Penutup

Institusi internasional saat ini berkembang dengan pesat dalam kajian hubungan internasional. Peran institusi internasional sangat penting dalam politik internasional guna menciptakan kerja sama diantara negara-negara internasional. Karena menurut Robert O Keohane bahwa institusi internasional memiliki potensi untuk menciptakan dan

memfasilitasi terciptanya kerja sama namun kerja sama itu sendiri tidak akan terjadi tanpa adanya kerja sama internasional diantara negara-negara internasional. Artinya konsep sentralisasi, independen, rasionalitas sebuah negara mau bergabung dalam institusi internasional dan seperti apa refleksi dari institusi internasional itu sendiri bergantung pada sejauh mana kepentingan bersama masing-masing negara dalam institusi tersebut dan tingkat non intervensi dari negara-negara besar dalam proses berjalannya sebuah institusi internasional yang selayaknya mampu menjadi mediasi, fasilitasi kerja sama dan menciptakan perdamaian internasional.

E. Daftar Pustaka

- Andreas Hasenclever, Peter Mayer, Volker Rittberger, 1996, "*Interests, Power, Knowledge: The Study of International Regimes*", *Mershon International Studies Review*, Vol. 40, No. 2.
- Haggard, Stephan and Simmons, B.A. 1997. "Theories of International Regimes." *International Organization* 41, 3, pdf copy (World Peace Foundation and The Massachusetts Institute of Technology, Summer.
- Kenneth W. Abbot dan Suncan Snidal. 1998. *Why states act throught Formal International Organizations*. Journal Conflict Resolution. Vol 42. London. SAGE Publication.
- Keohane, Robert. 2004. *The Demand of International Regime*. New Jersey: Cambridge University Press.

Krasner, Stephen D. 1982. "Structural Causes and Regime Consequences: Regimes as Intervening Variables." *International Organization* 36/2 (Spring). Reprinted in Stephen D. Krasner, ed., *International Regimes*, Ithaca, NY: Cornell University Press

_____. 2005. "Cooperation and International Regimes After Hegemony Cooperation: an Discord in The World Political Economy". NY: Cornell University Press.

Martha Finnemore. *Norms, Culture and World Politics: Insight from Sociology's Institutionalism*. Journal International Organization. Vol 50. The International Organization Foundation and The Massachusetts Institute of Technology.

Robert O Keohane. 1998. *International Institutions: Two Approaches*. Harvard University: International Studies Quarterly No 32. 379-396.

Rosenau, James N. and Ernst-Otto Czempiel, eds. (1992). *Governance without Government: Order and Change in World Politics*, Cambridge: Cambridge University Press.

Tony, Evans and Peter, Wilson 2002, 'Regime Theory and the English School of International Relations: A Comparison', Millennium 21.

_____. 1997. "Introduction: three perspectives on international regimes", dalam *Theories of International Regimes*. Cambridge: Cambridge University Press.

_____. "Interest-based theories: political market failure, situation and problem structures, and institutional bargaining", dalam *Theories of International Regimes*. Cambridge: Cambridge University Press.

Young, Oran R. 1982. *Regime Dynamics: The Rise and Fall of International Regimes*". London: Cornell University Press.